

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah peristiwa khusus di mana rakyat memilih pemimpin mereka untuk memimpin negara. Pemilihan ini adil, jujur, dan rahasia, artinya setiap orang dapat memilih dengan bebas tanpa ada yang tahu bagaimana mereka memilih. Pemilihan ini mengikuti aturan hukum dan nilai-nilai Indonesia yang disebut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serupa, tetapi terjadi di daerah yang lebih kecil seperti kota atau desa. Orang-orang di daerah tersebut memilih secara langsung untuk memilih pemimpin daerah mereka, dan hanya mereka yang memenuhi aturan tertentu yang dapat memilih. Pemilihan tersebut dilaksanakan secara serentak untuk memilih kepala daerah beserta wakilnya dalam satu pasangan calon. (Mandasari *et al.*, 2019).

Setiap beberapa tahun, masyarakat Indonesia dapat memilih pemimpin mereka melalui pemungutan suara khusus yang disebut pemilihan umum. Pemilihan umum ini termasuk memilih pemimpin di berbagai daerah, seperti gubernur atau wali kota. Pemilihan umum ini sangat penting karena memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara dan daerahnya, serta memastikan bahwa pemerintah berlaku adil dan mematuhi aturan dasar negara. Untuk memastikan bahwa pemilihan umum ini adil dan jujur, pemilihan umum harus dilakukan oleh kelompok khusus yang jujur, terampil, dan bertanggung jawab, sehingga semua orang dapat mempercayai hasilnya. (Rundengan, 2022).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk implementasi demokrasi di tingkat lokal yang proses pelaksanaannya diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi merupakan sistem dengan orientasi utama adalah masyarakat (Diryo Suparto, S.sos., 2015). Pemilu ini merupakan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin karena mereka adalah warga negara. Dengan memilih, kita menunjukkan betapa kita menghargai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, yang merupakan bagian dari menjadi warga negara Indonesia. Hal ini berdasarkan pada aturan yang disebut Pasal 28 dalam UUD 1945, sebagaimana dijelaskan oleh Priyanti & Kurniawan. (Prasetyawati & Adi, 2021).

Partisipasi politik merupakan komponen esensial bagi sistem demokrasi yang sehat dan inklusif menurut Pizzorno. 1970; Huntington, 1991; Kaim, M dalam (Abubakar et al., 2024). Dengan cara ini, masyarakat dapat membantu memutuskan hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka. Ketika mereka berbagi pendapat, aturan menjadi lebih dapat dipercaya. Hal ini juga membantu memastikan bahwa pemerintah mendengarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak politik yang dimiliki oleh setiap individu. Pemenuhan hak politik tersebut tercermin melalui kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat serta berkumpul, sebagaimana diungkapkan oleh Surbakti dalam (Pratiwi, 2019). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28, yang menyatakan bahwa

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang."

Menurut Budiardjo dalam (Fakhri, 2019) berpendapat bahwa Partisipasi politik merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem politik yang sah. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik, khususnya melalui pemilu, didorong oleh keyakinan bahwa melalui partisipasi kolektif tersebut, aspirasi dan kepentingan mereka akan tersalurkan atau setidaknya mendapatkan perhatian dari pihak yang berwenang.

Ketika orang memutuskan untuk memilih, pilihan mereka dibentuk oleh cara mereka berpikir dan merasakan politik. Perasaan dan pikiran ini memengaruhi kandidat atau partai mana yang mereka pilih. Cara orang memilih menunjukkan bagaimana perasaan mereka terhadap komunitas dan negara mereka. Memilih penting karena membantu orang memiliki suara dalam cara pemerintahan mereka dijalankan, menjadikan negara lebih adil dan demokratis.(Pratiwi, 2019).

Definisi perilaku politik atau perilaku pemilih merupakan suatu keikutsertaan atau sikap warga negara yang secara sukarela dan atas kemauan sendiri dalam membuat keputusan- keputusan politik. Menurut Surbakti dalam (Sukarno, 2023) Perilaku politik adalah cara pemerintah dan masyarakat berbicara satu sama lain dan bekerja sama. Perilaku politik meliputi pembuatan aturan, penerapan aturan tersebut, dan memastikan aturan tersebut dipatuhi. Ketika seseorang, seperti pemilih, memutuskan cara memilih, pilihan mereka dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di sekitar mereka, seperti perasaan, teman, atau apa yang mereka lihat dan dengar.

Perilaku pemilih adalah bagaimana seseorang memutuskan siapa yang akan dipilih berdasarkan apa yang mereka suka atau anggap terbaik. (Djuwita, 2019). Orang-orang yang berjualan di Pasar Horas di Pematangsiantar merupakan kelompok khusus anggota masyarakat. Cara mereka memutuskan siapa yang akan dipilih tidak hanya dipengaruhi oleh uang dan pekerjaan, tetapi juga oleh teman, keluarga, dan cara mereka memandang budaya dan tradisi mereka. Para pedagang ini memiliki nilai-nilai yang sama dan bekerja sama sebagai sebuah komunitas, yang membantu mereka merasa terhubung dan bangga dengan diri mereka sendiri. Karena itu, menjadi bagian dari kelompok ini merupakan bagian penting dari identitas mereka—siapa mereka dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri.(Milla Nur Afifah, Retna Hanani, 2019)

Pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan calon pemimpin atau partai politik tertentu dapat membentuk persepsi mereka terhadap calon yang akan dipilih. Misalnya, jika seorang calon memiliki rekam jejak yang baik dalam mendukung kebijakan yang menguntungkan pedagang, hal ini dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk dipilih (Simanjuntak & Fernandes, 2022)

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa perilaku pemilih di kalangan pedagang Pasar Horas, Pematangsiantar, sangat dipengaruhi oleh faktor kepentingan ekonomi dan politik identitas. Para pedagang cenderung memilih pasangan calon (paslon) yang mampu memenuhi tuntutan mereka, terutama terkait dengan pemulihan dan perbaikan infrastruktur pasar pasca kebakaran besar yang baru-baru ini terjadi. Kebutuhan akan perbaikan gedung serta peningkatan sarana prasarana dan Pencalonan tokoh-tokoh yang berpengaruh

dan memiliki rekam jejak baik mampu meningkatkan peluang menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politik mereka.(Mulyadi, Rosalina Damayanti, Taufik Abdullah, Nazarni, 2024)

Selain faktor ekonomi, observasi juga mengindikasikan bahwa politik identitas masih menjadi strategi yang digunakan oleh beberapa paslon untuk menarik dukungan dari kalangan pedagang. Faktor kesamaan suku, agama, dan jaringan sosial tertentu turut berperan dalam membentuk preferensi pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pemilih di pasar tidak hanya didasarkan pada aspek rasional seperti kepentingan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan emosional yang dibangun melalui politik identitas.

Temuan ini mengindikasikan bahwa perilaku pemilih di kalangan pedagang Pasar Horas merupakan kombinasi dari rasionalitas ekonomi dan keterikatan identitas sosial.

Politik identitas adalah ketika orang atau kelompok bertindak atau berkumpul untuk membicarakan pengalaman dan isu-isu yang penting bagi kelompok mereka. Mereka melakukan ini untuk berbagi perasaan, memperjuangkan hak-hak mereka, dan bekerja untuk mencapai tujuan mereka, semuanya berdasarkan apa yang membuat kelompok mereka unik dalam Clarissa Rile Hayward (Yunus et al., 2023).

Table 1.1 Presentase pemilih dikalangan pedagang di pasar horas pematangsiantar

NO	Nama	Percentasi Pemilih			
		01	02	03	04
1	Y	✓			
2	CS	✓			
3	FS			✓	
4	RP		✓		
5	YS	✓			
6	PAP				✓
7	RS			✓	
8	TFH	✓			
9	ABS			✓	
10	A		✓		

Sumber: Hasil observasi awal penulis 2024

Menurut wawancara awal dari salah satu pemilih dikalangan pedagang dipasar horas pematangsiantar yaitu ibuk Y yang sudah berdagang dipasar horas selama 5 tahun lebih mengatakan bahwa para pedagang lebih cenderung memilih pemimpin yang dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan di pasar horas pematangsiantar, yang dimana baru saja terjadi kebakaran besar yang memberikan dampak besar bagi para pedagang dan masyarakat dari segi sosial, ekonomi, dan psikologis.

Menurut Surbakti dalam (Sukarno, 2023) Politik adalah tentang bagaimana pemerintah dan rakyat (masyarakat) bekerja sama. Politik melibatkan pengambilan keputusan, pelaksanaannya, dan memastikan keputusan tersebut dipatuhi. Ketika orang memutuskan siapa yang akan dipilih, pilihan mereka dapat dipengaruhi oleh hal-hal di dalam diri mereka atau dari dunia di sekitar mereka. Ada berbagai cara untuk memahami mengapa orang memilih dengan cara tertentu. Hal ini penting bagi orang-orang yang akan memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di tempat bernama Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Penelitian ini memaparkan model perilaku pemilih antara model sosiologis, psikologis dan pemilih rasional para pedagang di pasar horas pematangsiantar dalam pilkada 2024.

Berdasarkan tiga model perilaku pemilih, yaitu sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Ketiga model perilaku pemilih tersebut menjadi alat ukur menganalisis model perilaku pemilih yang paling banyak memengaruhi pedagang pasar horas di pematangsiantar di kelurahan dwikora, Kecamatan siantar barat, kota pematangsiantar, Sumatera utara.

Dari uraian diatas yang mendorong penulis untuk menyelidiki fenomena tersebut. Karena itu, peneliti memilih judul “Perilaku Pemilih di Kalangan Pedagang Pasar Horas pada Pilkada Kota Pematangsiantar 2024”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perilaku pemilih di kalangan pedagang Pasar Horas pada Pilkada Pematangsiantar 2024?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi politik pedagang?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka focus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku pemilih dikalangan pedagang pasar horas pematangsiantar dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dikalangan pedagang pasar horas pematangsiantar dalam pemilihan kepala daerah di pematangsiantar tahun 2024

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih dikalangan pedagang pasar horas pematangsiantar dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di pematangsiantar
2. Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih di kalangan pedagang pasar horas pematangsiantar dalam pemilihan kepala daerah di pematangsiantar tahun 2024

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu masyarakat memahami bagaimana pedagang di Pasar Horas, Kota Pematangsiantar, menentukan pilihannya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada masyarakat yang tinggal di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa

Universitas Malikussaleh. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Studi ini akan membantu kita lebih memahami bagaimana pedagang Pasar Horas di Pematangsiantar menentukan siapa yang akan dipilihnya pada Pilkada 2024.